

## PERAN BKN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MANUSIA, IPTEK DAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN

### PENDAHULUAN

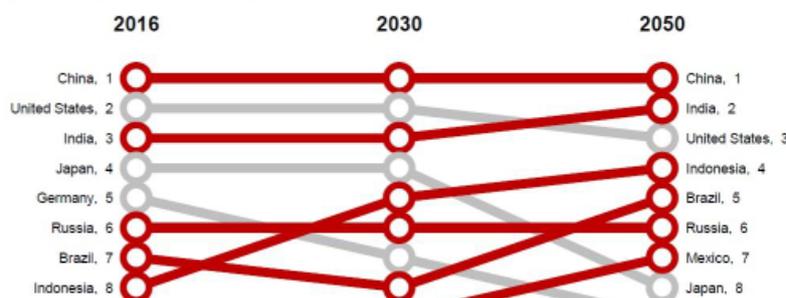
Penelitian yang dilakukan oleh konsultan multinasional *Pricewatercooper (PwC)* dalam laporannya menyebutkan bahwa pada tahun 2050 Indonesia berada pada peringkat 4 (empat) besar kekuatan ekonomi dunia di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (PwC,

2017) sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1. Peringkat tersebut mengacu pada *Gross Domestic Product (GDP)* atau produk domestik bruto. Untuk mencapai hal tersebut Indonesia dapat melakukan diversifikasi pada ekonomi makro dan mikro dari ketergantungan minyak dan dengan memperkuat institusi baik dari sektor swasta, BUMN dan juga Pemerintah serta mempersiapkan infrastruktur penunjangnya. Penguatan sektor pemerintah sejalan dengan ringkasan eksekutif visi Indonesia 2045 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Visi Indonesia 2045 dibentuk sebagai sarana pencapaian menuju 100 tahun Indonesia.

### Ringkasan Eksekutif

- Teknologi dan manusia di kemudian hari dalam penyelenggaraan manajemen ASN dapat bekerja sama secara optimal untuk menggapai visi Indonesia 2045.
- Terdapat 4 (empat) aktivitas teknologi sebagai partner bekerja ASN: identifikasi permasalahan dan peluang perbaikan; menyiapkan pendekatan yang tepat untuk memecahkan masalah; implementasi pendekatan pemecahan masalah; dan melakukan iterasi dan refleksi terhadap dampak yang ditimbulkan.
- BKN sebagai *marketplace* penyedia pegawai bertalenta yang disatukan dalam sebuah jejaring internet yang dinamakan *cloud*.

Figure 2: Projected GDP rankings (at PPPs)



Gambar 1. Peta Perjalanan Kenaikan Ekonomi Dunia  
Sumber: (PwC, 2017)

Visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Pemerataan Pembangunan;

Penulis : Ivan Fauzan  
Penanggungjawab : Agus Sutiadi  
Redaktur : Ajib Rakhmawanto  
Editor : Haryanah  
Editor Bagian : Ardy Firman Syah  
Azmi Listya Anisah  
Diana Marifah  
Design Grafis/Section Editor : Santosa  
Sekretariat : Givan Permadi  
Alamat : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No.12  
Cililitan - Jakarta Timur  
Telp : 021-80887011  
e-mail : pengkajianpenelitianbkn@gmail.com

Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Pertanyaan selanjutnya, dapatkah Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantu mewujudkan visi tersebut? Harapan dari jawaban tersebut tentu saja bahwa BKN dapat membantu mewujudkan visi tersebut melalui Berkarya dengan Kerja Nyata.

Menjadi bagian dari terwujudnya visi Indonesia 2045, BKN perlu melaksanakan langkah strategis dengan membagi kedalam periode perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah tidak hanya mengambil langkah pendek yang mudah untuk dilakukan dan langsung terlihat hasilnya tetapi juga dengan perencanaan berkelanjutan yang memiliki manfaat jangka panjang (Liao, Warner, & Homsey, 2020). Perencanaan berkelanjutan pada Visi Indonesia 2045 dapat diwujudkan BKN dengan melaksanakan tugas dan fungsinya. BKN saat ini berada di dalam pilar pertama yaitu pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK dan pilar keempat yaitu pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

#### PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK

Keempat pilar pembangunan dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Pada pilar pertama, Indonesia diharapkan dapat memiliki kualitas manusia yang memiliki pendidikan yang tinggi dan merata di seluruh Indonesia yang dibarengi dengan budaya dan etos kerja yang tinggi, serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Pada Pilar kedua, difokuskan pada arah peningkatan ekonomi dan keberlanjutannya. Pilar ketiga, difokuskan pada pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pilar keempat, berfokus pada Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan yang semakin

kokoh dengan kualitas demokrasi yang semakin baik, reformasi kelembagaan dan birokrasi, pembangunan sistem hukum nasional dan anti korupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta kemampuan pertahanan dan keamanan yang tinggi.

Pilar pertama visi Indonesia 2045 sejalan dengan laporan hasil survei yang disusun oleh Korn Ferry. Sejumlah 67% pemimpin perusahaan bertaraf global yang berpartisipasi dalam survei tersebut menyebutkan teknologi akan menjadi penggerak pekerjaan di masa depan (Korn Ferry, 2020). Korn Ferry memperlihatkan perkembangan teknologi tersebut haruslah dibarengi dengan *supply* (penyediaan) pekerja yang memiliki talenta. Saat ini secara global banyak perkembangan teknologi membantu pekerjaan manusia, dan secara khusus Indonesia juga mengikuti tren tersebut dengan menghadirkan jargon revolusi 4.0 di hampir setiap aspek pekerjaan. Perkembangan teknologi tersebut juga melahirkan sebuah ancaman ketidakselarasan antara perkembangan teknologi (otomatisasi, kecerdasan buatan, *machine learning*, dll.) dengan ketersediaan manusia yang bertalenta dalam menggunakan teknologi agar mendapatkan potensi penuh dari kemajuan teknologi tersebut. Semua peluang yang akan dihasilkan oleh teknologi dalam pekerjaan akan tidak tercapai bila terjadi kekurangan atau kekosongan pekerja yang memiliki talenta dalam penguasaan teknologi.

#### TEKNOLOGI SEBAGAI PARTNER ASN

Sejak tahun 2014 BKN telah melaksanakan proses pengadaan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan teknologi *computer-assisted test* (CAT) yang berdasarkan cepat, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan hal ini untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan pilar visi Indonesia 2045, BKN menyelenggarakan pengadaan ASN melalui pendekatan teknologi baru guna mendapatkan talenta-talenta ASN yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik lagi. Penggunaan teknologi baru (seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan *machine learning*) dalam pengadaan ASN saat ini masih dalam tahap sebatas konsep. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut diikuti dengan

peningkatan kompetensi ASN guna menghadapi tantangan kedepan. Pengadaan pegawai ASN oleh BKN dapat menggunakan beberapa alternatif teknologi, seperti penggunaan jejaring internet *cloud* untuk mendapatkan pegawai-pegawai bertalenta yang disatukan dalam sebuah jejaring internet *cloud*. ASN yang sudah berada pada sistem *database* BKN dapat bekerja di luar instansi induknya untuk melaksanakan pekerjaan berbasis *project/teamwork*. Dalam hal ini BKN menjalankan fungsinya sebagai penyedia data dan informasi Pegawai ASN bertalenta. Data dan informasi pegawai ASN tersebut dijadikan sebagai sebuah *big data* yang berisi informasi khususnya perihal kemampuan yang dimiliki oleh ASN. Dapat dianalogikan bahwa BKN merupakan sebuah *marketplace* yang menyediakan data dan informasi pegawai-pegawai ASN bertalenta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam menempatkan pegawai yang tepat.

Dalam penyelenggaraan manajemen ASN, BKN dapat menanamkan pola pikir manusia dan teknologi dapat bekerja sama secara optimal untuk mencapai kontribusi maksimal. Hal ini dikarenakan pekerjaan di dunia pemerintahan dibangun dan dilakukan oleh serangkaian pekerjaan yang tetap maka teknologi masuk dalam proses pekerjaan tersebut sebagai sarana agar keduanya (teknologi dan manusia) berkontribusi secara maksimal. Sebagai contoh sistem digital, *software spreadsheet* dapat melakukan pemrosesan data yang begitu besar dan melakukan identifikasi terhadap sebuah pola data. Manusia dapat melakukan analisa pada pola data, anomali, dan membuat sebuah kesimpulan.

Terdapat 4 (empat) aktivitas teknologi sebagai partner bekerja ASN diantaranya: identifikasi permasalahan dan peluang perbaikan; menyiapkan pendekatan yang tepat untuk memecahkan masalah; implementasi pendekatan pemecahan masalah; dan melakukan iterasi dan refleksi terhadap dampak yang ditimbulkan. Contohnya pada proses audit Manajemen ASN, identifikasi permasalahan pada proses pelaksanaan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN akan menggunakan sistem. Auditor Kepegawaian hanya akan melihat pada sebuah permasalahan

yang tak biasa dilihat oleh sistem serta mencari peluang untuk memperbaiki sistem dan mitigasi permasalahan tersebut. Setelah permasalahan itu dikenali dan ditemukan solusi permasalahan tersebut lalu dilakukan iterasi kembali ke dalam sistem untuk menjadikan sebuah pembelajaran pada sebuah kasus yang sama di beda lokus. Apabila terdapat kasus yang sama pada lokus yang berbeda Auditor Kepegawaian dapat menerima atau menolak mitigasi risiko yang diberikan oleh sistem.

#### KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN

Peran dan fungsi BKN dalam pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan mengacu pada reformasi birokrasi yang digunakan untuk mewujudkan: (a) tercapainya kepentingan publik melalui peran dan fungsi pemerintah; (b) adanya ketepatan dalam fungsi dan ukuran kelembagaan birokrasi yang kontekstual; (c) tatakelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor, serta (d) kelembagaan birokrasi yang andal dan modern dengan SDM aparatur sipil negara yang profesional, dan mampu mengelola perubahan dengan baik (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Pilar keempat sesuai dengan pendapat Eggers, O'leary, dan Datar (2019) bahwa terdapat tiga dimensi yang akan mempengaruhi masa depan pekerjaan di dunia pemerintahan: kerja (*work*); tenaga kerja (*workforce*); dan tempat kerja (*workplace*). Terkait dengan *workplace* khususnya di pemerintahan bahwa *workplace* bukan hanya berfokus pada ruang fisik semata tetapi juga terhadap pelaksanaan *practice management* serta struktur organisasi yang membantu bekerja pada sebuah lingkungan kerja (Eggers, O'leary, & Datar, 2019). Dalam hal ini diharapkan organisasi pemerintah dapat menjadi lembaga yang ramping (*lean*) setelah dilakukan optimalisasi untuk mendapatkan ketepatan dalam fungsi dan ukuran kelembagaan birokrasi yang kontekstual. Sehingga organisasi pemerintah akan menghasilkan *practice management* dan pelayanan publik yang lebih cepat (*agile*) dengan mengedepankan sebuah tatakelola pemerintahan efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor.

## PENUTUP

Perencanaan berkelanjutan di BKN guna mewujudkan Visi Indonesia 2045 dilaksanakan dengan pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak langsung terhadap cara kerja ASN. Kedepan BKN dapat membiasakan pola pikir manusia dan teknologi dalam penyelenggaraan manajemen ASN, serta dapat bekerja sama secara optimal dan menjadikan teknologi sebagai *partner* ASN. Adanya penggunaan teknologi yang masif pada penyelenggaraan manajemen ASN, peran dan fungsi BKN dapat mengarah pada perubahan tata kelola pemerintah sehingga terjadi peningkatan produktivitas Institusi Pemerintah secara umum dan ASN secara khusus.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pendekatan teknologi *cloud*, *machine learning* dan kecerdasan buatan dapat digunakan dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

Dalam penyelenggaraan manajemen ASN dapat menanamkan pola pikir manusia dan teknologi secara optimal untuk mencapai kontribusi maksimal.

Peningkatan kompetensi ASN diperlukan untuk membangun sistem kerja berbasis teknologi informasi

BKN dapat menyesuaikan diri dengan visi Indonesia 2045 untuk menjadi lembaga yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaan birokrasi secara kontekstual sehingga menghasilkan pelayanan manajemen ASN dan pelayanan publik yang lebih cepat (*agile*) dengan mengedepankan tatakelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara. (2020, Juli 23). *Renstra BKN*. Retrieved from Official Website BKN: <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/11/RENSTRA-2015-2019-BKN-UPLOAD-MENPAN.pdf>
- Badan Kepegawaian Negara. (2020, June 20). *Website BKN*. Retrieved from Official Website BKN: <https://www.bkn.go.id/berita/memasuki-era-new-normal-bakal-terjadi-perubahan-pada-tren-pekerjaan-asn>
- Damerji, H., & Salimi, A. (2021). Mediating effect of use perceptions on technology readiness and adoption of artificial intelligence in accounting. *Accounting Education*, 1-24.
- Eggers, W., O'leary, J., & Datar, A. (2019). *The future of work in government Navigating a shifting talent landscape*. London: Deloitte Insight.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Korn Ferry. (2020). *Future of Work The Global Talent Crunch Country Perspective: Indonesia*. Los Angeles: Korn Ferry.
- KPMG. (2021, February 22). Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/kpmg/2016/11/23/how-technology-is-transforming-the-audit/?sh=3388959d716c>.
- Liao, L., Warner, M. E., & Homsy, G. C. (2020). When do plans matter? Tracking changes in local government sustainability actions from 2010 to 2015. *Journal of the American Planning Association*, 86(1), 60-74.
- PwC. (2017). *The Long View How will the global economic order change by 2050?* PwC.